



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 192      TAHUN : 1994  
SERI :DNO. 190

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 426 TAHUN 1994

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH**  
**TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBYEK WISATA**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ten tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara RePublic Indonesi Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang

Penyerahan Sebagian urusan  
Pemerintahan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Dibidang  
Kepariwisata Kepada Kabupaten  
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESEHAN PE-RATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1994  
TENTANG TEMPAT REKREASI/OBYEK  
WISATA

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gianyar Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tempat Re-  
kreasi/Obyek Wisata disahkan dengan perubahan  
sebagai berikut:

- a. Penamaan, pada kalimat "PERATURAN DAERAH  
dan seterusnya" kata "WISATA" pada akhir kalimat  
diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA".
- b. Pembukaan.
  - b.1. Konsiderans Menimbang.
    - b.1.1. Huruf a antara kata "pembangunan" dan  
kata "sektor" disisipkan kata-kata" serta  
meningkatkan mutu pe-layanan didalam".
    - b.1.2. Huruf c kata "Wisata" pada akhir  
kalimat diubah dan dibaca "dan Daya Tarik  
Wisata".
  - b.2. Konsiderans Mengingat.
    - b.2.1. Angka 1 diubah menjadi 3 dan angka 3  
diubah menjadi angka 1 beserta kalimat  
berikutnya.
    - b.2.2. Setelah angka 3 ditambah angka 4 dan  
5 baru dan dibaca sebagai ber-ikut:
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang  
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3427);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 1979 Penyerahan sebagian  
pemerintahan dalam riir.z Kepariwisata  
Kepada (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1979 nomor 34; Tambahan Lembaran

negara Republik Indonesia nomor 3144); diubah menjadi angka 6 dan dibaca sebagai berikut:

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

b.2.4. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan dibaca sebagai berikut:

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dibidang Kepariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242).

b.2.5. Pada menetapkan, kalimat 'PERATURAN.....dan seterusnya "kata "WISATA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf d, e dan g diubah dan dibaca sebagai berikut:

"d. Obyek dan daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Wisata";

e. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata;

g. Tempat rekreasi adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas penyegaran kesegaran jasmani dan rohani mengan-dungunsur hiburan, pendidikan, budaya disuatu tempat tertentu".

c.2. Setelah Pasal 1 huruf g ditarnbah Bab II baru dan dibaca sebagai berikut:

## "BAB II

### **KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN JASA YANG NYATA SEBAGAI DASAR PUNGUTAN TEMPAT REKREASI DAN DAYA TARIK WISATA"**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara mutu sumber daya tempat rekreasi dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemerintah Daerah Wajib memberikan perlindungan menjagakeselamatan dan memberi pelayanan

sebaik-baiknya  
kepada para Wisatawan.

- c.3. Bab II diubah menjadi Bab III beserta kalimat berikutnya.
- c.4. Pasal 2 diubah menjadi pasal 3 dan kata-kata "Wisata dan Kawasan Obyek Wisata" antara kata "obyek" dan kata "dikenakan" diubah dan dibaca "dan daya tarik Wisata".
- c.5. Pasal 3 diubah menjadi pasal 4 dan kata "wisata dan kawasan obyek wisata" antara kata "Obyek" dan kata "dimaksud" diubah dan dibaca "dan daya tarik wisata".
- c.6. Bab III diubah menjadi Bab IV beserta kalimat berikutnya.
- c.7. Pasal 4 diubah menjadi pasal 5.
  - c.7.1. Hurufakata "kawasan obyek wisata" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "tempat-tempat rekreasi".
  - c.7.2. Huruf b kata "tempat-tempat Rekreasi" antarakata "mengunjungi" dan tanda "garis miring (/)" dihapus dan kata "wisata" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "dan daya tarik ata".
  - c.7.2. . Huruf c kata "wisata" pada akhir kata diubah dan dibaca ' daya tarik wisata".
- Bab 1 menjadi Bab V beserta
- c-9. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 dan ayat (1 :sata' antara kata "Obyek" dan -- dipungut" diubah dan dibaca "dan daya tarik pariwisata".
- c.10. Bab V diubah menjadi Bab VI beserta kalimat berikutnya.
- c.11. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 beserta kalimat berikutnya.
- c.12. Bab VI diubah menjadi Bab VII dan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.
- c.13. Bab VII diubah menjadi Bab VIII beserta kalimat berikutnya.
- c.14. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 9 dan ayat (2) huruf ekata "tersangka" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "seseorang".
- c.15. Bab VIII diubah menjadi Bab IX beserta kalimat berikutnya.
- c.16. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 dan dibaca sebagai berikut:

## **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

c.17. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11.

c.17.1 Ayat (1) diubah menjadi ayat (2) dan dibaca sebagai berikut:

"(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".

c.17.2 Ayat (2) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.

d. Penutup, kata "Gianyar 31 Januari 1994" seharusnya ditulis dan dibaca "

Ditetapkan di : Gianyar

Pada tanggal : 31 Januari 1994

e. Penjelasan.

e.1. Pada kalimat "PERATURAN DAERAH . . . dan seterusnya" kata "WISATA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA"

e.2. PASAL DEMIPADAL, setelah Pasal 1 cukup jelas ditambah Pasal 2 baru dan dibaca sebagai berikut "Pasal 2 cukup jelas", serta Pasal 2, 3 dan seterusnya "berturut-turut diubah menjadi Pasal 3, 4 dan seterusnya sampai dengan Pasal 11".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
9. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
13. Ketua. DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 167 Tanggal :20  
September 1994 Seri ; D  
Nomor : 167

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857